



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **BUMN/BUMD**
LEMBAGA : **PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)**
UNIT KERJA : **DEWAN DIREKSI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROBBI YANUAR WALID**
2. Jabatan : **DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN CORPORATE SECRETARY**
3. NHK : **827307**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.080.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3554 m2/100 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1963 m2/300 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **735.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 CC STREET BIKE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA CBX 500 STREET BIKE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



20.000.000

6. MOBIL, MAZDA CX 5 SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000

7. MOBIL, WULING AIREV MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI

Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 14.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 3.800.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 726.980.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 9.355.980.000

III. HUTANG

Rp. 183.584.873

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.172.395.127

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.